



PERAN AGAMA DALAM MEMAKNAI SILA PERSATUAN INDONESIA: PERSPERKTIF FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSONS

Ery Ricardo Nababan

Prodi Magister Sosiologi Agama UKSW

Abstract:

Precepts of Indonesian Unity were formulated and established as a solution as well as a common concept for the reality of Indonesia's diversity since its inception as an independent country. The precepts of Indonesian Unity in particular and Pancasila as a whole bind all Indonesian citizens in a system that is static as the basis of the state, but which is also dynamic in the course of nationalism and facing the challenges and opportunities of the times. Religion, which is also the reality of Indonesia's diversity, is no doubt also required to interpret itself (religion) within the framework of Pancasila, especially the principle of Indonesian Unity which is the third principle. Using Talcott Parsons' structural functionalism theory approach, this article attempts to analyze the role of religion in interpreting the precepts of Indonesian Unity throughout its history. This study uses the literature study method and combines it with exploration from several sources as a reference and is combined with information related to this study.

Keywords: *religion, indonesian unity precepts, talcott parsons structural functionalism*

Abstrak:

Sila Persatuan Indonesia dirumuskan dan ditetapkan sebagai solusi sekaligus konsep bersama atas kenyataan keragaman Indonesia sejak awal dicituskannya menjadi sebuah negara yang merdeka. Sila Persatuan Indonesia khususnya dan Pancasila secara keseluruhan mengikat seluruh warga negara Indonesia dalam sebuah sistem yang statis sebagai sebuah dasar negara, namun juga yang dinamis di dalam perjalanan kebangsaan dan menghadapi tantangan serta peluang zaman. Agama, yang juga menjadi realita keberagaman Indonesia tak ayal juga dituntut untuk memaknai diri (agama tersebut) di dalam bingkai Pancasila khususnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga. Dengan menggunakan pendekatan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, artikel ini mencoba untuk menganalisis peran agama dalam memaknai sila Persatuan Indonesia dalam sepanjang sejarah keberadaannya. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka serta menggabungkannya dengan eksplorasi dari beberapa sumber sebagai referensi dan digabungkan dengan informasi-informasi terkait kajian ini.

Kata kunci: peran agama; pancasila; struktural fungsional; talcott parsons



PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak ditetapkannya pada 18 Agustus 1945, Pancasila mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.¹ Lima sila berikut penjabarannya secara normatif dan konstitusi disebut-sebut sebagai *way of life* dan juga *rule of law*-nya Indonesia. Dia (Pancasila) disepakati bersama menjadi payung bersama masyarakat Indonesia dalam semua realita kehidupan yang ada. Karena itu, Pancasila tidak seharusnya dibayangkan sebagai kontrak sosial atau sebagai *modus vivendi*². Sebagai alternatif, Pancasila dapat dijustifikasi dengan memperkuat fungsinya sebagai “konsepsi politis”, yaitu sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan publik dan politik, dan bukan kehidupan privat.³

Sila persatuan Indonesia yang menjadi sila ketiga Pancasila dirumuskan dan ditetapkan sebagai jawaban atas realita Indonesia yang beragam atau plural. Sadar betul akan keberadaan Indonesia yang sedemikian plural, Presiden Soekarno merumuskan sila ini. Sila Persatuan Indonesia adalah suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman tadi dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan Bhineka Tunggal Ika.⁴

Namun bagaimana sila Persatuan Indonesia secara khusus dan Pancasila secara umum dapat diterima dan diberlakukan sebagai sistem sosial atau paling tidak menjadi panduan dalam sistem sosial? Bagaimana pula sila Persatuan Indonesia dan penjabarannya jika diperhadapkan dengan sistem agama yang juga telah mengambil peran di tengah-tengah masyarakat Indonesia pra kemerdekaan untuk diinternalisasi dalam sebuah sistem sosial dan sistem tindakan bersama? Dari keterangan dan pemaparan di atas, penulis mengangkat judul tulisan ini Peran Agama Dalam Memaknai Sila Persatuan Indonesia: Perspektif Fungsionalisme Struktural Talcot Parsons.

¹ Yudi Latif, Negara Paripurna: *Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2011, hlm. 38

² Agus Wahyudi dkk (Ed.), *Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm.125

³ *Ibid.*,

⁴ *Op.Cit.*, hlm. 369



METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti.⁵

Pengertian di atas berdasarkan pendapat Creswell (dalam Djam'an satori & Aan komariah, 2017, hlm. 24) yang menyatakan bahwa definisi metode penelitian kualitatif adalah suatu proses inkuiri (pertanyaan/investigasi) mengenai pemahaman suatu hal untuk mendapatkan data, informasi, teks pandangan-pandangan responden yang menggunakan beragam metodologi dalam suatu masalah atau fenomena sosial atau kemanusiaan. Tentunya, hal ini sangat bersebrangan dengan penelitian kuantitatif yang memperlakukan partisipan penelitian sebagai objek; hanya nilai, angka, atau pilihan jawaban yang diolah. Alih-alih menganalisis statistik, penelitian kualitatif justru ingin mendapatkan gambaran subjektif dari partisipan penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Raco (2018, hlm. 7) bahwa metode penelitian kualitatif adalah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral yang memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Teoretik Talcot Parsons Parsons dan Biografinya

Parsons atau Talcot Parsons lahir pada tahun 1902 di Colorado Springs, Amerika Serikat. Dia memiliki latar belakang religius dan intelek; ayahnya adalah seorang menteri keagamaan, profesor, dan juga seorang presiden sebuah kampus kecil.⁶ Ia belajar di Amherst College (1902-1924), London School of Economics (1924), Universitas Heidelberg (1925-1926). Mulai tahun 1927 ia menjadi dosen di Harvard University,

⁵ Donny Siburian, Menggugat Perceraian: Aspek-Aspek Kekerasan Gender Dalam Praktek Perceraian (Paulakhon) Pada Masyarakat Batak. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, (2021), No. 2: 211–225.

⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 406



mula-mula di fakultas ekonomi, kemudian pada tahun 1931 di fakultas sosial dimana ia menjadi ketuanya pada tahun 1944.⁷

Dalam catatan sejarah, Parsons adalah tokoh fungsionalisme struktural yang terbesar hingga saat ini.⁸ Terbesar, karena teorinya yang membahas masyarakat dan fungsinya dipahami dapat menjawab permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Meski terdapat kritikan, Talcott Parsons dinilai berjasa dalam mengintrodusir sosiologi sebagai sebuah bidang kajian yang memiliki batasan dan daya tarik tersendiri. Ia memperkenalkan pemikir Eropa, Max Weber dan Emile Durkheim kepada sosiolog Amerika Serikat. Tulisan klasiknya, *The Structure of Social Action*, 1937, dikenal sebagai “*charter for sociology*” dan *The Social System*, 1951, yang menghantarkan terbentuknya satu dinding pembatas (*building block*) bagi mereka yang mengenal perpektif fungsionalisme dalam sosiologi.⁹ Melalui karyanya tersebut pula, Parsons menjadi figur dominan di dalam sosiologi Amerika.¹⁰

Strukturalisme Fungsional

Teori strukturalisme fungsionalisme Parsons bermula dari pandangannya akan masyarakat dalam artian luas. Asumsi dasarnya dialaskan pada bagaimana masyarakat yang begitu besar dan kompleks dapat terjaga kesatuannya dan keberlangsungannya. Maka kemudian pandangannya tertuju pada masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya.¹¹ Bagi Parsons, masyarakat akan tumbuh dan berkembang dari masyarakat sederhana kepada masyarakat kompleks. Dalam hal ini, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat tersebut berjalan secara perlahan atau evolusioner. Walaupun institusi sosial terus bertambah banyak, hubungan antara satu dengan yang lainnya akan tetap dipertahankan karena setiap intitusi

⁷ K.J. Veeger, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 201

⁸ Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, hlm.96

⁹ *Ibid*

¹⁰ George Ritzer, *Op.Cit.*, hlm.407

¹¹ [http://blog.unnes.ac.id/aknesnovi/2017/12/02/teori-fungsionalisme-struktural/#:~:text=Menurut%20George%20Ritzer%20\(1985%20%3A%2025,juga%20berlaku%20fungsional%20terhadap%20lainnya.&text=Dengan%20demikian%20masyarakat%20merupakan%20kumpulan,la in%20berhubungan%20dan%20saling%20ketergantungan,](http://blog.unnes.ac.id/aknesnovi/2017/12/02/teori-fungsionalisme-struktural/#:~:text=Menurut%20George%20Ritzer%20(1985%20%3A%2025,juga%20berlaku%20fungsional%20terhadap%20lainnya.&text=Dengan%20demikian%20masyarakat%20merupakan%20kumpulan,la in%20berhubungan%20dan%20saling%20ketergantungan,)



baru itu berkembang dari institusi yang sama. Hal ini dianalogikan seperti organisme biologis, dimana bagian-bagian dalam organisme sosial itu memiliki sistemnya sendiri; atau dengan kata lain subsistem yang dalam beberapa hal tertentu ia dapat berdiri sendiri. Latar belakang inilah yang menuntun munculnya fungsionalisme struktural yang sangat mempengaruhi pemikiran Talcott Parsons.

Dari asumsi yang dijelaskan di atas kemudian Parsons mengembangkannya menjadi suatu masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian, hubungan yang saling mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat timbal-balik. Sekalipun integrasi sosial itu tidak dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang sifatnya dinamis.¹²

Teori fungsionalisme struktural merupakan teori dalam paradigma fakta sosial dan paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang, sehingga dapat disinonimkan dengan sosiologi. Teori ini memfokuskan kajian pada struktur makro (sosiologi makro) yakni pada sistem sosial, yang melalui teori ini Parsons menunjukkan pergeseran dari teori tindakan ke fungsionalisme struktural. Kekuatan teoretis Parsons terletak pada kemampuannya melukiskan hubungan antara struktur sosial berskala besar dan pranata sosial. Bangunan teori fungsionalisme struktural Parsons banyak terpengaruh oleh pemikiran Durkheim, Weber, Freud dan Pareto, dan yang disebut terakhir inilah yang paling besar pengaruhnya bagi pengembangan teori fungsionalisme struktural, terutama gagasan Pareto tentang masyarakat yang dilihatnya dalam hubungan sistem.¹³

Teori fungsionalisme struktural Parsons berkonsentrasi pada struktur masyarakat dan antar hubungan berbagai struktur tersebut yang dilihat saling mendukung menuju keseimbangan dinamis. Perhatian dipusatkan pada bagaimana cara keteraturan dipertahankan di antara berbagai elemen masyarakat. Perhatian teori ini pada unsur struktur dan fungsi dalam meneliti proses sosial dalam masyarakat dan pandangannya pada masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau subsistem yang saling tergantung. Teori ini menganggap integrasi sosial merupakan fungsi utama sistem sosial. Integrasi sosial ini mengonseptualisasikan masyarakat ideal yang di

¹²<https://www.kompasiana.com/divia91390/5fb105cbd541df40744dece2/kajian-pemikiran-talcott-parsons-fungsionalisme-struktural-terhadap-resistensi-masyarakat-atas-uu-cipta-kerja?page=all>,

¹³<https://wkuswandro.wordpress.com/2015/10/30/teori-fungsionalisme-struktural-talcott-parsons/>



dalamnya nilai-nilai budaya diinstitusionalisasikan dalam sistem sosial, dan individu (sistem kepribadian) akan menuruti ekspektasi sosial. Maka, kunci menuju integrasi sosial menurut Parsons adalah proses kesalingbersinggungan antara sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial, atau dengan kata lain, stabilitas sistem.¹⁴

Perilaku individu dilihat sebagai terbentuk oleh pola-pola institusional yang melalui mekanisme sosialisasi dan kontrol sosial. Tindakan individu harus memenuhi persyaratan-persyaratan fungsional ini. Teori fungsional cenderung untuk mulai dengan struktur yang sudah ada. Tekanan utamanya adalah pada usaha untuk mengerti dinamika-dinamika sosial yang harus ada untuk keberlangsungannya.¹⁵ Parsons juga mengatakan bahwa sistem sosial akan selalu berproses ke arah integrasi sekalipun terjadi ketegangan, disfungsi, dan penyimpangan. Sementara perubahan-perubahan dalam sistem sosial terjadi secara gradual melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak terjadi secara revolusioner.¹⁶ Pada pelaksanaannya, fungsionalisme struktural harus memiliki empat fungsi yang kemudian diteruskan Parsons harus ada di semua sistem apa pun yang dikenal dengan skema *AGIL*¹⁷-nya (*Adaptation, Goal, Integration, Latency*).

Dalam mendalami materi dalam judul tulisan ini, maka diperlukan beberapa hal terkait teori fungsionalisme Parsons yang akan diarahkan kepada tujuan akhir tulisan ini. Dari beberapa hal yang dibahas Parsons sebagai unsur penting dalam mendalami teori fungsionalisme ini, penulis mengembangkan beberapa, di antaranya: peran aktor, sistem tindakan, dan kesalingterhubungan/integrasi.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Eny Lestari, MS, *Kelompok Tani Sebagai Media Interaks Sosial: Kajian Analisis Fungsional Struktural Talcott Parson*

¹⁶ <https://www.kompasiana.com/divia91390/5fb105cbd541df40744dece2/kajian-pemikiran-talcott-parsons-fungsionalisme-struktural-terhadap-resistensi-masyarakat-atas-uu-cipta-kerja?page=all>,

¹⁷ *AGIL*= *Adaptation* (adaptasi), masyarakat sebagai produk dari keluarga-keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu mengharuskan untuk beradaptasi, belajar menyesuaikan terhadap lingkungannya. *Goal* (gol/tujuan), sistem diharuskan untuk mengerucutkan pemikiran individu agar dapat membentuk kepribadian individu dalam mencapai tujuan itu sendiri. Tujuan disini bukanlah tujuan individu, melainkan tujuan bersama. *Integration* (integrasi), yakni masyarakat harus mengaitkan hubungan di antara komponen komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. Integrasi menunjuk pada persyaratan untuk satu tingkat solidaritas minimal sehingga para anggotanya akan bersedia untuk bekerjasama dan menghindari konflik yang merusakkan. *Latency* (pola), yakni bahwa masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya. Latensi menunjuk pada kebutuhan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota masyarakat.



Peran Aktor

Dalam *The Structure of Social Action* (1949/1937), Parsons mengklaim bahwa tindakan sosial adalah perilaku manusia yang dimotivasi dan diarahkan oleh makna yang dilihat aktor di dunia luar. Aktor yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, organisasi, wilayah, masyarakat total, atau peradaban.¹⁸ Bagi Parsons, struktur-struktur sosial menentukan peranan-peranan dan pola-pola perilaku yang tetap, yang oleh masyarakat diharapkan dari seorang dokter, petani, ibu rumah tangga, orang beragama, warga negara, dan sebagainya. Ketunggalan individu melenyap dibalik peranan-peranan yang telah dilembagakan oleh masyarakat. Pelembagaan itu ditiadakan demi suatu kesatuan (integrasi) dan orde masyarakat. Peranan-peranan resmi itu dipakai sebagai mekanisme yang mengintegrasikan orang ke dalam kesatuan sosial.¹⁹ Aktor dalam fungsionalisme struktural Parsons bertugas merencanakan, menetapkan, mengerjakan, mengawal sistem sosial yang ada. Bahkan jika terjadi kekacauan atau konflik, aktor bereperan penting untuk memperbaiki dan membawa kembali kepada pola sistem yang semula. Disini terlihat betapa penting peran aktor dalam keberlangsungan masyarakat; bahwa aktor bukanlah semata-mata individu yang lepas dari sistem, tapi terkait kepada sistem. Untuk itu, setiap anggota masyarakat, menurut Parsons, dalam sistem sosial secara otomatis masuk dan berkewajiban mengerjakan sistem yang ada.

Dalam suatu proses sosialisasi yang berhasil, norma-norma dan nilai-nilai diinternalisasi; yakni norma-norma dan nilai-nilai itu menjadi bagian dari “suara hati” para aktor. Akibatnya, dalam mengejar kepentingan-kepentingannya sendiri, para aktor sebenarnya melayani kepentingan-kepentingan sistem sebagai suatu keseluruhan.²⁰ Jadi, kata *action* untuk menjelaskan peran aktor dipilih oleh Parsons dengan penuh kesadaran dan dalam pertentangan terhadap *behavior*. Kata *behavior* hanya mengartikan suatu gerak fisik saja, yang dapat ditinjau, tetapi kata perilaku atau tindakan pertama-tama mengandaikan adanya seorang aktor yang aktif dan kreatif, yang mempertimbangkan

¹⁸ Inger Fursed, *An Introduction to the Sociology of Religion*, England: Ashgate Publishing Limited, 2006, p.60

¹⁹ K.J. Veeger, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 201

²⁰ George Ritzer, *Op.Cit.*, hlm. 415



perbuatannya. Manusia yang berkesadaran, berkemauan, dan berkelakuan, menduduki posisi sentral dalam teori Parsons.²¹

Menurut penjelasan di atas, aktor adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem sosial. Di satu sisi, aktor adalah bagian dari masyarakat pelaksana sistem sosial yang ada, tapi di sisi lain aktor juga terhubung dengan masyarakat atau sistem lain dalam rangka tujuan bersama yang jelas akan menemukan benturan-benturan dari perbedaan yang ada-kalau hendak dikritik-namun berusaha untuk tetap berinteraksi di dalamnya. Untuk itu, aktor disini bukan cuma bermakna individu yang menghadapi situasi sendirian, tapi lebih sebagai posisi dalam peran sosial yang menyediakan perilaku yang sesuai dan juga berhubungan dengan pera-peran sosial lain.²²

Sistem Tindakan dan Sistem Kultur

Sistem tindakan dan institusionalisasi manusia dipahami sewaktu dia membuat pilihan atau keputusan. Manusia sebagai aktor dan manusia mempunyai tujuan yang hendak dicapai hal inilah yang menyebabkan munculnya tindakan tertentu oleh individu. Komponen dasar terbentuknya tindakan tertentu (unit tindakan) adalah:

- a. Tindakan muncul karena ada tujuan yang hendak dicapai
- b. Tindakan terjadi karena kondisi/situasi yang mendorong munculnya tindakan sebagai alat
- c. Adanya norma yang mengatur tindakan itu muncul untuk mencapai tujuan.²³

Unit-unit tindakan yang dilakukan individu dalam kehidupan sosial yang saling berinteraksi berdasarkan aturan (*normative*) yang disepakati untuk mencapai tujuan, disebut sistem tindakan sosial. Sistem tindakan yang sudah terjadi secara berulan-gulang secara rapi, dan sudah menjadi pola kelompok disebut institusionalisasi. Parsons mengecam atau menolak paham positivisme utilitarian tentang tindakan manusia. Paham ini mengatakan tindakan manusia semata diorientasikan pada kesenangan dan keuntungan rasional. Sebagian besar tindakan manusia itu terbentuk dari keterpaduan unsur: tujuan, kondisi, alat dan norma yang bersifat kompleks dan panjang. Dalam kerangka umum,

²¹ K.J. Veeger, *Op.Cit.*, hlm. 200

²² Rahmad K. Dwi, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, Yogyakarta: Ar.Rozz Media, 2008, hlm. 119-120

²³ Eny Lestari, MS, *Op.Cit.*,



menurut Parson orientasi subyek/individu untuk bertindak itu terdiri dari dua elemen dasar yaitu:²⁴

a. Orientasi motivasional, yang terdiri dari tiga dimensi:

1. *Dimensi kognitif*, yaitu pengetahuan individu tentang situasi, pengetahuan membuat generalisasi, membedakan rangsangan satu dengan yang lain,

2. *Dimensi katektik*, yaitu reaksi emosional individu terhadap situasi, reaksi positif atau negatif, dan

3. Dimensi evaluatif, berbagai alternatif dirinya.

b. Orientasi Nilai. Komponen dalam orientasi nilai sifatnya menunjuk pada standar normatif keputusan dengan umum, bukan orientasi tertentu/khusus (orientasi motivasional). Orientasi nilai ini terdiri dari tiga dimensi:

1. Dimensi kognitif, yang berhubungan dengan sistem kepercayaan budaya,

2. Dimensi apresiatif yang berhubungan dengan simbolisme apresiatif, dan

3. Dimensi moral, yang berhubungan dengan sistem budaya dalam orientasi nilai.

Sementara itu, sistem kultur yang mendapat perhatian Parsons, menegaskan bahwa sistem kultur berfungsi sebagai sistem simbol yang terpola. Parsons berpandangan bahwa terpenting-pentingnya struktur lebih penting sistem kultur bagi sistem sosial. Sistem kultur menurutnya merupakan kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial (mengikat sistem tindakan). Kultur menjembati interaksi antar aktor, menginteraksi kepribadian dan menyatukan sistem sosial. Kultur mempunyai kapasitas khusus untuk menjadi komponen sistem yang lain. Dalam sistem sosial, sistem diwujudkan dalam norma dan nilai.²⁵ Sistem kultur tersebut sebgaiian besar bersifat simbolik dan subjektif, kultur dengan mudah ditularkan dari satu sistem ke sistem lainnya melalui penyebaran (difusi) dan proses belajar serta sosialisasi. Hal lainnya adalah kultur mempunyai kemampuan mengendalikan sistem tindakan yang lain. Teori fungsionalisme struktural Parsons dipakai untuk mengetahui berbagai proses interaksi kultur dan sosial dalam masyarakat serta kemungkinan terjadinya pelestarian serta integrasi melalui dua

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Mohammad Syawaludin, *Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur*, dalam jurnal Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014, hlm.161



konsep sistem dan fungsi.²⁶ Dengan demikian, sistem tindakan dan sistem kultur dalam sistem sosial menurut Parsons mengerucut pada kombinasi sekaligus elaborasi antara aktor, tindakan, dan kultur. Sistem tindakan yang diinstitusionalisasi dalam diri aktor dan dipertemukan dengan sistem kultur yang ada menjadikan sebuah tindakan yang sadar, terpola, dan menemukan diri (tindakan) pada norma-norma yang ada dan tidak serampangan.

Kesalingterhubungan atau Integrasi

Dari semua pemikiran dan usahanya memahami kehidupan masyarakat dalam konsep sosiologi, Parsons mengarah kepada upaya mewujudkan komitmennya dalam membangun keseimbangan, tertib, dan keteraturan sosial.²⁷ Gagasan Durkheim tentang fakta sosial sebagai kekautan empirik, eksternal, koersif dan menyebar, dibiarkan oleh Parsons dalam menjelaskan berbagai perilaku sosial. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mawujud dalam berbagai bentuk norma, budaya, adat kebiasaan yang terbagi bersama dapat dijadikan sebagai pangkal pijakan dalam menjelaskan keteraturan dalam masyarakat.²⁸ Dari seluruh pemahaman Parsons tentang sosiologi dalam perspektif fungsionalisme strukturalnya, Parsons mengidealkan sebuah masyarakat yang dalam unsur-unsurnya terintegrasi satu sama lain. Sistem tindakan haruslah menrujuk kepada sistem kultur yang ada. Aktor dalam sistem tindakan harus memperhatikan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga mampu mengerjakan fungsinya dalam kerrangka tujuan bersama. Tidak cukup sampai disitu, skema *AGIL* yang diperkenalkan Parsons pun bermuara pada kesalingterhubungan/terintegrasi dari keempatnya.

Dari sini dapat ditarik pemahaman bahwa bagi Parsons, sosiologi dalam masyarakat harus dipandang dari kesalingterhubungannya segenap faktor yang ada di dalamnya. Bangunan fungsional dari semua faktor yang ada di dalam masyarakat diarahkan untuk semampu-mampunya hidup, berinteraksi, berelaborasi, mengevasluasi, dan merekonsiliasi. Ini bukanlah sebuah keadaan tiba-tiba ada atau utopia, tapi dia adalah buah dari kesalingtehubungan atau terintegrasi.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, hlm. 97

²⁸ *Op.Cit.*, hlm. 98



Sila Persatuan Indonesia dan Maknanya

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya bahwa segenap yang dirumuskan negara terkait pengelolaan negara berdasar kepada Pancasila. Lebih jauh, Pancasila berarti identitas diri segenap orang yang memutuskan sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dengan identitas tersebut, setiap orang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan nafas dan rumusan Pancasila. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kepada Pancasila secara utuh untuk dijelaskan dalam tulisan ini baik secara historis maupun maknanya, dan dengan alasan efisiensi, agaknya cukuplah penulis langsung pada pembahasan penjelasan Sila Persatuan Indonesia untuk kemudian dielaborasi terhadap fungsionalisme struktural Parsons.

Dalam pidatonya di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekarno menyampaikan demikian:²⁹ “Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau Moenandar, mengatakan tentang "Persatuan antara orang dan tempat". Persatuan antara orang dan tempat, tuantuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya! Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan "Gemeinschaft"nya dan perasaan orangnya, "l'ame et desir". Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu, Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah s.w.t membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan dimana "kesatuan-kesatuan" disitu. Seorang anak kecilpun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara 2 lautan yang besar, lautan Pacific dan lautan Hindia, dan diantara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmaheira, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantaranya, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada

²⁹*file:///D:/UKSW/MATA%20KULIAH/AGAMA%20DAN%20NASIONALISME/pidato-soekarno-lahirnya-pancasila.pdf,*



pinggir Timur benua Asia sebagai "golfbreker" atau pengadang gelombang lautan Pacific, adalah satu kesatuan.”

Dari pidato Soekarno tersebut tersemat jiwa Indonesia di dalam membentuk, merumuskan, dan menentukan akan seperti apa, dan mau jadi apa Indonesia yang akan diproklamasikan tersebut adalah Persatuan Indonesia.

Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah, persatuan mengandung pengertian bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Dari pidato Soekarno di atas, memahami persatuan Indonesia adalah memahami hakikat Indonesia. Indonesia mengandung adanya 2 (dua) makna, yaitu makna geografis, yang berarti sebagian bumi yang membentang dari 95-141 derajat Bujur Timur dan dari 6 derajat Lintang Utara sampai 11 derajat Lintang Selatan. Makna yang kedua adalah makna politis, yaitu bangsa yang hidup dalam wilayah tersebut. Indonesia dalam sila ketiga Pancasila adalah Indonesia dalam artian bangsa tersebut.³⁰

Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sehingga paham kebangsaan yang menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa yang bersangkutan.³¹

Selaku dasar negara dan alat pemersatu bangsa, maka Pancasila bersifat statis. Tetapi Pancasila mengandung pula suatu dinamika yaitu sebagai suatu bintang pimpinan yang menghikmatikan jiwa kita di dalam kehidupan dan perjuangan kita sepanjang sejarah hingga sekarang ini. Ia mendasari dan menjiwai; ia adalah jalan yang riil dan tujuan yang penuh dengan daya tarik. Ia merupakan kesatuan bulat antara realisme dan idealisme.³² Dengan prinsip Sila Persatuan Indonesia, negara tidak bermaksud untuk menghapuskan

³⁰ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 49

³¹ *Ibid.*,

³² Roeslan Abdulgani, *Respakan dan Amalkan Pancasila*, Yayasan Prapanca, 1963, hlm. 117



keanekaragaman bangsa Indonesia, tetapi tetap mengakui keberadaannya, dan kepada kita digariskan prinsip hidup bernegara untuk memandang bermacam-macam keragaman yang melekat pada bangsa itu secara wajar di dalam kerangka kesatuan bangsa Indonesia. Dengan demikian kita tidak tergoda untuk mempertajam perbedaan yang ada menuju perpecahan bangsa, akan tetapi memelihara persatuan di antara sesama warga bangsa Indonesia.³³

Persatuan Indonesia tidaklah dimaknai sebagai keseragaman dalam perbedaan, akan tetapi dimaknai sebagai penghormatan terhadap perbedaan. Inklusivitas merupakan kekuatan yang harus dikelola dengan semangat gotong royong untuk menuju cita-cita dan atau tujuan bernegara.³⁴ Berdasarkan pernyataan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, pengertian Persatuan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan faktor yang penting dan sangat menentukan keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia. Persatuan merupakan suatu syarat yang mutlak untuk terwujud suatu negara dan bangsa dalam mencapai tujuan bersama.³⁵

Makna Persatuan Indonesia adalah bahwa sifat dan keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat satu. Sifat dan keadaan keadaan negara Indonesia yang sesuai dengan hakikat satu berarti mutlak tak dapat dibagi, sehingga bangsa dan negara Indonesia yang menempati suatu wilayah tertentu merupakan suatu negara yang berdiri sendiri memiliki sifat dan keadaannya sendiri yang terpisah dari negara lain di dunia. Sehingga negara Indonesia merupakan suatu diri pribadi yang memiliki ciri khas, sifat dan karakter sendiri yang berarti memiliki suatu kesatuan dan tidak terbagi-bagi.³⁶ Pengertian Persatuan Indonesia terutama dalam proses mencapai Indonesia merdeka, sebagai faktor kunci, sumber semangat dan sumber motivasi, sampai tercapainya Indonesia merdeka. Dalam pengertian inilah maka Persatuan Indonesia adalah merupakan suatu perwujudan dalam bentuk yang dinamis.³⁷

73 ³³ Wisnu Tri Hanggoro, *Bunga Rampai Pancasila*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1986, hlm.

³⁴ Broery Doro Pater Tjaja dkk, *Pancasila Rumah Bersama*, Jakarta: libri, 2017, hlm.77

³⁵ H.Kaelan, *Filsafat Pancasila (Pandangan Hidup Bangsa Indonesia)*, Yogyakarta: Paradigma, 2002, hlm.180

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,



Sila persatuan Indonesia oleh Soekarno diartikan sebagai realita sekaligus ideologi Indonesia. Sila ini menjadi sebuah jawaban atas keragaman yang dimiliki Indonesia mulai dari adat istiadat, agama dan sistem kepercayaan, bahasa, dan lain-lain. Sila Persatuan Indonesia jika dijabarkan menurut kaidah bahasa Indonesia terdiri dari dua kata: Persatuan (sebagai subjek) dan Indonesia (sebagai keterangan). Persatuan Indonesia secara morfologi berarti suatu hasil dari perbuatan, jadi merupakan nomina. Ditinjau dari sudut dinamikanya, pengertian persatuan yaitu suatu proses yang dinamis Indonesia adalah merupakan suatu kuantitas yaitu persatuan untuk wilayah, bangsa, dan negara Indonesia.³⁸

Dalam buku Pancasila sebagai pedoman perilaku, dijabarkan makna setiap sila dalam Pancasila. Untuk sila Persatuan Indonesia, demikian isinya:³⁹

1. Mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kita harus menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa serta di atas kepentingan pribadi dan golongan,
2. Mengajarkan kepada kita sekalian, bahwa sebagai seorang warga negara yang baik maka jika negara sedang dalam bahaya, kita harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara yaitu siap bertempur untuk menghadapi yang hendak menggempur,
3. Mengajarkan kepada kita agar kita sekalian sebagai warga Indonesia yang baik merasa wajib untuk bersikap cinta tanah air dan bangsa, dan
4. Mengajarkan kepada kita sekalian, bahwa kita harus merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.

Sila Persatuan Indonesia Dalam Perspektif Fungsionalisme Struktural

Dari historisnya, Pancasila dirumuskan dan ditetapkan sebagai konsensus bersama rakyat Indonesia yang diwakilki para tokoh di dalamnya untuk menjadi dasar membentuk, mengelola, menyikapi, dan memperbaiki masyarakat yang disebut Indonesia. Dalam perspektif fungsionalisme struktural Parsons, Pancasila dan perumusannya paling tidak sudah melengkapi asumsi-asumsi dasar sosiologis untuk didalami sebagai sebuah sistem sosial dan dikaji kemudian. Bahwa Pancasila adalah

³⁸ H. Kaelan, *Op.Cit.*, hlm.179

³⁹ A. S. Kesumajana, *Pancasila Sebagai Pedoman Perilaku (Pancasila Ditinjau Secara Filsafat)*, Bandung:Tarsito, 1989, hlm. 43-46



sistem sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama Indonesia yang secara historis akan merdeka tapi yang juga kemudian merayakan dan mengisi kemerdekaannya sepanjang sejarah keberadaannya.

Sila persatuan Indonesia dengan arti dan makna yang telah dijabarkan jika dibawakan dalam pemahaman fungsionalisme structural Parsons bermakna persatuan Indonesia adalah persatuan wilayah dan orangnya, mengarah kepada sebuah kondisi dimana wilayah yang berbeda dan orang yang berbeda pula beradaptasi menjadi Indonesia satu (*Adaptation*), yang bertujuan merdeka (*Goal*), terintegrasi dari Sabang sampai Merauke (*Integration*), dan menetapkan serta hidup dalam pola ke-Indonesiaan dengan norma-norma dan hukum positif yang diterjemahkan dari sila tersebut (*Latency*).⁴⁰ Sila Persatuan Indonesia tidak mengesampingkan dan meniadakan perbedaan yang ada pada Indonesia historis tersebut, tapi justru sila tersebut menjadi sebuah jawaban dari sebuah realita yang ada. Di samping itu, sila Persatuan Indonesia yang dalam sistem tindakan dan aktor (yang akan dijelaskan kemudian). Persatuan Indonesia juga adalah persatuan aktor sekaligus persatuan sistem tindakan dan sistem kultur masyarakat Indonesia di dalam ber-Indonesia yang secara bersamaan memiliki perbedaan. Dalam kaitannya dengan agama, maka pernyataan Presiden ke-5⁴¹ Indonesia dalam pidatonya yang mengutip pernyataan Presiden Indonesia ke-1 Soekarno dapat menegaskan: *“Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India; kalau jadi islam, jangan jadi orang Arab; kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya nusantara yangkaya raya ini.”*

Dalam teori Parsons tentang fungsionalisme struktural yang berfokus kepada kestabilan sosial dengan berpedoman kepada sistem atau konsensus yang disepakati bersama, maka sila Persatuan Indonesia merupakan struktur sistem yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengejawantahan sila Persatuan Indonesia terletak pada keinginan dan kerelaan bersama setiap individu masyarakat hidup bersama sekalipun berbeda. Untuk itu, agama-agama yang ada di Indonesia perlu untuk menyelamatkan diri dalam sistem bersama sila Persatuan Indonesia beserta norma-norma yang dijabarkan dan ditetapkan dari sila tersebut. Sila Persatuan Indonesia yang adalah

⁴⁰ Bandingkan dengan skema AGIL Parsons

⁴¹ Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato ini dalam rangka HUT PDI-P ke-44 di Jakarta



produk bersama harus dimaknai sebagai komponen yang tidak terpisahkan di dalam menjaga stabilitas sosial dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Sila Persatuan Indonesia secara filosofis menjaga keutuhan sistem sosial Indonesia yang secara riil beragam dan plural.

Tokoh Agama Sebagai Aktor

Menurut Renan syarat bangsa ialah “kehendak akan bersatu”. Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa: “*le desir d’être ensemble*”, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.⁴² Dalam konteks Indonesia, tentu penelasan di atas dipahami bahwa kehendak bersatu yang dimaksud tentu adalah kehendak semua orang, elemen, agama dan tokoh agama di dalamnya.

Sebagai sebuah sistem (dalam sistem sosial) yang ada di negara Indonesia, agama berperan bersama Pancasila berperan menjaga kestabilan dan produktivitas masyarakat ke arah yang positif. Hal ini yang dalam fungsionalisme struktural Parsons dimaknai sebagai integrasi. Untuk itu, aktor dalam agama berperan penting di dalam memahami dan mensosialisasikan Indonesia yang sepakat bersatu tadi ke dalam nilai-nilai dan sistem agamanya masing-masing. Dalam proses sosialisasi tersebut. Donny Paskah Martianus Siburian dalam artikelnya “*Agama Kristen dan Hoax: Peran Agama Kristen dalam menekan Hoax*” menyebutkan bahwa ada kecenderungan aktor agama menginternalisasi nilai dan norma ke dalam masyarakat untuk merespon gejala negative dari luar.⁴³ Persatuan Indonesia yang diterjemahkan kepada nilai-nilai hidup maupun hukum positif di Indonesia kepada dirinya terlebih dahulu dan kepada umat beragama lainnya. Dalam pada itu, dibutuhkan kedewasaan beragama dalam mempertemukan nilai-nilai sila Persatuan Indonesia dengan ajaran agama masing-masing sebagai dua sistem sosial dan sistem nilai dalam satu payung Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴² <https://d2kblog.wordpress.com/>

⁴³ Donny Siburian. *Agama Kristen dan Hoax: Peran Agama Kristen dalam menekan Hoax*. BIA’: *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, (2021) Vol 4, no. 2: 226-237.



Sila Persatuan Indonesia Sebagai Sistem Tindakan Bersama

Nilai filsafat Pancasila secara filosofis-ideologis dan konstitusional berkembang dalam sistem kenegaraan Indonesia; yang dapat dinamakan sebagai sistem kenegaraan Pancasila yang terjabar dalam UUD Proklamasi 1945. Jadi, tegaknya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa merdeka, berdaulat, bersatu dan bermartabat amat ditentukan oleh tegaknya integritas sistem kenegaraan Pancasila dan UUD Proklamasi 1945.⁴⁴ Sistem kenegaraan Republik Indonesia secara formal adalah kelembagaan nasional yang bertujuan mewujudkan asas normatif filosofis-ideologis (*in casu* dasar negara Pancasila) sebagai kaidah fundamental dan asas kerohanian negara di dalam kelembagaan negara bangsa (*nation state*). NKRI adalah negara bangsa (*nation state*) sebagai pengamalan sila Persatuan Indonesia, yakni nilai wawasan nasional yang ditegakkan dalam NKRI dan wawasan nusantara.⁴⁵ Sila Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan. Bangsa bukan sesuatu yang diwariskan dari masa lalu, tetapi suatu “proyek dan tantangan bersama” bagi masa kini dan masa depan. Oleh karena itu harus melibatkan semua dan tidak seorang pun warga yang dieksklusifkan.⁴⁶ Aktualisasi Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk perundang-undangan Indonesia.⁴⁷

Penerimaan Pancasila dasar negara sebagai milik bersama akan memudahkan kita membangun negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional yang telah disepakati sebagai hukum dasar yang dijabarkan dari Pancasila untuk kemudian dijabarkan lagi ke dalam hukum-hukum dan politik hukum selanjutnya. Penerimaan Pancasila dasar negara sebagai milik bersama membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara terutama dalam politik hukum nasional.⁴⁸

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya dengan menerima Pancasila sebagai sistem tindakan bersama dalam perspektif fungsionalisme struktural

⁴⁴ Agus Wahyudi dkk (Ed.), *Op.Cit.*, hlm.79

⁴⁵ *Op.Cit.*, hlm.88

⁴⁶ *Op.Cit.*, hlm.68

⁴⁷ H.Kaelan, *Filsafat Pancasila (Pandangan Hidup Bangsa Indonesia)*, Yogyakarta: Paradigma, 2002, hlm.35

⁴⁸ Agus Wahyudi dkk (Ed.), *Op.Cit.*, hlm. 31



Parsons maka keberlanjutan dan kehidupan bermasyarakat dapat berjalan. Selanjutnya, sila Persatuan Indonesia berikut makna dan penjabarannya secara normatif dan konstitutif dijalankan bersama agama-agama di Indonesia sebagai tindakan besama dalam payung Indonesia Raya. Sebaliknya, penolakan dan kesalahpahaman terhadap nilai-nilai Pancasila khususnya Sila Persatuan Indonesia akan membawa kepada keadaan yang kacau, tidak tentram, tidak kondusif yang berujung kepada terhambatnya pembangunan. Di awal telah dipaparkan bahwa perilaku individu dilihat sebagai terbentuk oleh pola-pola institusional yang melalui mekanisme sosialisasi dan kontrol sosial. Tindakan individu harus memenuhi persyaratan-persyaratan fungsional ini. Teori fungsional cenderung untuk mulai dengan struktur yang sudah ada. Ini mengantarkan kita kepada sebuah pemahaman bahwa sila Persatuan Indonesia yang telah diterima tersebut berfungsi mengatur individu dalam mekanisme sosialisasi dan kontrol sosial tadi.

Gotong Royong

Sila Persatuan Indonesia pada hakikatnya membawa dan mengusung nilai gotong royong. Hal ini berdasar pada keragaman berbagai aspek kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia yang sudah dijelaskan di awal tulisan ini. Bahkan dalam pidatonya di sidang BPUPKI, Soekarno menegaskan bahwa pada hakikatnya keberadaan bangsa Indonesia dan Pancasila yang dirumuskan itu adalah gotong royong. Gotong royong yang dimaksud adalah gotong royong di setiap aspek kehidupan, termasuk sosial ekonomi.

Karena fungsionalisme struktural menganggap integrasi sosial merupakan fungsi utama sistem sosial, itu berarti peran tokoh di dalam sistem sosial dan penerapannya tidak hanya penting tapi juga harus terintegrasi atau saling terhubung. Peran agama di Indonesia mutlak harus memberi kontribusi secara gotong royong dalam pembangunan bangsa dan negara. Bahwa kebaikan dan kesejahteraan negara adalah kebaikan dan kesejahteraan agama pula. Untuk itu sikap primordialisme dan fanatisme beragama yang justru mengecilkan kedudukan agama di dalam negara tidak boleh ada di negara yang bersatu ini. Selain itu paham fundamentalisme dan eksklusivisme beragama yang berpengaruh kepada radikalisme dan terorisme harus diselesaikan bersama pula secara gotong royong semua agama di Indonesia.



Akhirnya, hanya dengan memahami untuk apa agama ada di tengah-tengah dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya, akan membawa perubahan besar dalam perjalanan Indonesia sebagai negara merdeka, bersatu, dan berdaulat. Setelah pemahaman itu terbangun, maka kemudian fungsi dari pemaknaan tersebut yang kemudian mewujudkan kepada tindakan-tindakan sistem yang ditokohi oleh aktor-aktor agama dan diinternalisasi dalam sistem sosial yang ada, maka tujuan bersama Indonesia di yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sila Persatuan Indonesia di dalam Pancasila adalah satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi satu sama lain. Sila Persatuan Indonesia merupakan jawaban sekaligus peluang bagi Indonesia memahami persatuan dalam kepelbagaian. Talcott Parsons, sang fungsionalisme struktural menginstruksikan bahwa sebuah struktur adalah jalan untuk mencapai tujuan yang didasari fungsi dari komponen-komponen yang ada di dalamnya, seperti aktor, sistem, dan tujuan. Untuk itu semua komponen-komponen tersebut harus saling terhubung/terintegrasi demi mencapai tujuan bersama. Dalam kaitannya dengan fungsionalisme struktural Parsons, agama dalam sila Persatuan Indonesia memiliki peran menjaga dan memelihara Indonesia untuk mencapai tujuan bersama lewat beberapa usaha yang ditawarkan fungsionalisme struktural Parsons, diantaranya: peran aktor agama, sistem tindakan bersama, dan kesalingterhubungan/integrasi atau juga bisa disebut gotong royong.



DAFTAR PUSTAKA

- A.S.Kesumajana, *Pancasila Sebagai Pedoman Perilaku (Pancasila Ditinjau Secara Filsafat)*, Bandung: Tarsito, 1989
- Agus Wahyudi dkk (Ed.), *Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009
- Broery Doro Pater Tjaja dkk, *Pancasila Rumah Bersama*, Jakarta: libri, 2017
- Eny Lestari, MS, *Kelompok Tani Sebagai Media Interaks Sosial: Kajian Analisis Fungsional Struktural Talcott Parson*
- George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- H.Kaelan, *Filsafat Pancasila (Pandangan Hidup Bangsa Indonesia)*, Yogyakarta: Paradigma, 2002
- Inger Fursed, *An Introduction to the Sociology of Religion*, England: Ashgate Publishing Limited, 2006
- K.J. Veeger, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta: Gramedia, 1993
- Mohammad Syawaludin , *Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur*, Jurnal Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
- Rahmad K. Dwi, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, Yogyakarta: Ar.Rozz Media, 2008
- Roeslan Abdulgani, *Respakan dan Amalkan Pancasila*, Yayasan Prapanca, 1963
- Siburian, Donny. Agama Kristen dan Hoax: Peran Agama Kristen dalam menekan Hoax. *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, (2021) Vol 4, no. 2: 226-237.
- Siburian, Donny. Menggugat Perceraian: Aspek-Aspek Kekerasan Gender Dalam Praktek Perceraian (Paulakhon) Pada Masyarakat Batak. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*. (2021) Vol. 23, No. 2:211–225.
- Sihombing, E. (2022). Peran Institusi Sosial: Analisis Postkolonial Pedagogis terhadap Ketidaksetaraan Gender dalam Konsep Hagabeon pada Upacara Kematian Mate Pupur Orang Batak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8108–8120. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3672>
- Simatupang, Johanes B. (2021). Perempuan dalam Budaya Adat Batak Toba. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10288–10296. Retrieved from <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2612>.



- Sinaga, Evan Daniel; Siburian, Donny Paskah Martianus. Menguji Segala Sesuatu: Membuktikan Kebenaran Melalui Perbuatan. *Jurnal Teologi Cultivation*. (2021). Vol 5, No. 2: 72-85.
- Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Tambunan, Daniel Tri Juniardo Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dalam Bingkai Agama dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Teologi Cultivation*. (2021). Vol 5, No. 2: 159-171
- Wisnu Tri Hanggoro, *Bunga Rampai Pancasila*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1986
- Yudi Latif, Negara Paripurna: *Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2011
- Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012